

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Strategi Pesan**

Mengenai bagian isi pesan dalam hal menggambarkan kelebihan dan kekurangan partai Fretilin dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022. Menurut teori mendapatkan kepatuhan yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis pada penelitian ini, ada 16 bentuk strategi pesan yang dapat digunakan untuk mendapatkan kepatuhan komunikasi. Namun sebelum menggunakan bentuk-bentuk pesan tersebut, seorang komunikator harus terlebih dulu mengidentifikasi jenis kekuasaan yang dimilikinya.

Terdapat tiga jenis kekuasaan, yang pertama adalah kemampuan yang dimiliki untuk memanipulasi akibat dari rangkaian tertentu, kemampuan yang dimiliki untuk menentukan posisi hubungan seseorang dengan orang lain, dan kemampuan yang dimiliki untuk menentukan nilai, kewajiban, atau keduanya.

Dalam hal ini, jenis kekuasaan yang dimiliki oleh Partai Fretilin adalah kekuasaan untuk memanipulasi dan menentukan posisi hubungan seseorang dengan orang lain. Setelah mengetahui itu, maka penulis dapat melihat bentuk-bentuk pesan yang dapat digunakan sesuai kekuasaan yaitu untuk memanipulasi dan menentukan posisi hubungan seseorang dengan orang lain.

Sesuai dengan teori ini, dalam setiap proses komunikasi, setelah mengakses jenis kekuasaan, dapat dipilih taktik-taktik menggunakan kekuasaan tersebut. Dari

16 bentuk strategi pesan, yang dapat digunakan oleh Partai Fretilin dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022 hanya 12 bentuk. 12 bentuk strategi pesan itu di antaranya:

**Tabel. 4.1. Strategi Perolehan Pemenuhan Marwell dan Schmitt**

No	Strategi Perolehan Pemenuhan Marwell dan Schmitt		
	Strategi	Pembahasan	
1	<i>Janji (promising):</i>	menjanjikan suatu hadiah untuk pemenuhan	Dengan menggunakan kekuasaan partai Fretilin dalam sebuah siaran TVTL ketua umum mengatakan Fretilin ingin membentuk pemerintahan Inklusif
2	<i>Mengetahui hasil positif (showing expertise about positive outcomes):</i>	menunjukkan seberapa bagus suatu hal yang akan terjadi pada semua yang patut	Pemerintahan yang bersih dan berasal dari semua orang ( inklusif)
3	<i>Menyukai (liking):</i>	menunjukkan pertemanan	Mengajak semua orang baik partai politik, professional partai dan intelektual
4	<i>Tawaran (pregiving): Penerapan stimulasi rasa tidak suka (applying aversive stimulation):</i>	memberikan hadiah sebelum mempertanyakan pemenuhan menerapkan hukuman sampai pemenuhan diterima	Menawarkan posisi penting kepada Xanana Gusmão dalam Pemerintahan
5	<i>Meminta balas budi (calling Ina debt):</i>	Mengatakan semua orang bantuan yang telah diterima pada masa lalu.	Partai Fretilin telah membantu pemerintahan yang dipimpin pada saat Xanana Gusmão memimpin yaitu memberikan jabatan perdana menteri kepada salah seorang anggota aktif partai Fretilin dan beberapa jabatan menteri kepada anggota aktif Partai Fretilin.
6	<i>Mengarahkan pada kewajiban moral (making moral</i>	menggambarkan pemenuhan sebagai moral baik yang harus dilakukan	Janji yang pada saat kampanye politik “bila Fretilin menang mayoritas dalam pemilihan Partai Fretilin tetap

			membentuk pemerintahan inklusif
7	<i>Memuaskan perasaan positif (attributing positive feelings):</i>	Mengatakan kepada orang lain beta senangnya jika terdapat kepatuhan	Masyarakat akan tentram dan makmur jika pemerintahan inklusif dilaksanakan.
8	<i>Memuaskan perasaan negatif.(attributing negative feelings):</i>	Mengatakan kepada orang lain betapa tidak senangnya jika tidak ada kepatuhan.	Tidak mendapatkan dukungan dari partai politik lain maka program pemerintahan tidak dilaksanakan.
9	<i>Pencitraan positif (positive altercasting):</i>	Menghubungkan pemenuhan dengan seseorang. dengan kualitas yang baik	Jika mendapatkan dukungan maka dijamin pemerintahan inklusif adalah pemerintahan yang bersih
10	<i>Pencitraan negatif (negative altercasting):</i>	Menghubungkan ketidakpatuhan adanya pemenuhan dengan seseorang dengan kualitas yang tidak baik	Menolak beberapa jabatan kementerian yang ditawarkan oleh KHUNTO dan menolak usulan PLP bahwa jabatan Presiden Parlemen Nasional jika wakil presiden PLP fidelis Magalahães.
11	<i>Patuh karena peduli(seeking altruistic compliance):</i>	Mencari kepatuhan orang lain semata-mata sebagai bentuk bantuan atau pertolongan orang lain.	Menawarkan posisi penting dalam pemerintahan Timor Leste
12	<i>Menunjukkan penghargaan/imbalan positif (showing positive esteem):</i>	mengatakan bahwa orang tersebut akan disukai oleh orang lain, terlebih lagi jika dia patuh	Xanana Gusmão

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa strategi pesan yang disampaikan oleh Partai Fretilin diantara strategi pesan pemenuhan untuk koalisi adalah: dalam kampanye untuk parlemen Nasional, apabila Partai Fretilin menang mayoritas dalam pemilihan akan membentuk pemerintahan inklusif hal inilah yang merupakan pesan utama dalam komunikasi politik untuk koalisi. Pemerintahan inklusif adalah Pemerintahan yang bersih dan berasal dari semua orang (inklusif).

Masyarakat akan tentram dan makmur jika pemerintahan inklusif dilaksanakan. Partai Fretilin mengundang dan Menawarkan posisi penting kepada Xanana Gusmão dalam Pemerintahan agar mau menerima tawaran tersebut, sebab Partai Fretilin telah membantu pemerintahan yang dipimpin pada saat Xanana Gusmão memimpin yaitu memberikan jabatan perdana menteri kepada salah seorang anggota aktif partai Fretilin Rui Maria De Araujo menggantikan Xanana Gusmão untuk menjadi perdana menteri dan beberapa jabatan menteri kepada anggota aktif Partai Fretilin. Pesan pemenuhan tersebut yang merupakan daftar pemenuhan kepatuhan Partai Fretilin untuk berkoalisi dalam pemerintahan dan diantara yang merupakan Ancaman untuk partai Fretilin pemenuhan pesan tidak tercapai karena Ancaman berasal dari Xanana Gusmão, PLP, dan KHUNTO. Karena Partai Fretilin menolak beberapa jabatan kementerian yang ditawarkan oleh KHUNTO dan menolak usulan PLP bahwa jabatan Presiden Parlemen Nasional diberikan wakil presiden PLP fidelis Magalahães. Penolakan tersebut yang mengakibatkan Tidak mendapatkan dukungan dari partai politik dalam pengesahan program pemerintah dan anggaran maka program pemerintahan tidak dilaksanakan dan Presiden Republik membubarkan Parlemen Nasional sehingga mengadakan pemilihan ulang untuk Parlemen Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2018.

Model tersebut berorientasi pada kekuasaan. Dari tabel tersebut pemenuhan untuk mendapat kekuasaan ada yang tidak dipenuhi dalam strategi pesan politik yang disampaikan sehingga Partai Fretilin dan Partai Demokrat

berkoalisi yang membentuk pemerintahan Inklusif dan Partai CNRT, PLP, dan KHUNTO memilih oposisi di Pemerintahan (Blok AMP).

## **1.2. Komunikasi Politik**

Pesan yang disampaikan oleh partai Politik Fretilin adalah untuk membentuk pemerintahan *Inklusive* dan *insidente* dalam Parlemen Nasional. ketua umum Partai Fretilin Mari Alkatiri ingin mengundang semua orang dan semua Partai yang mempunyai potensi/ kemampuan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan periode 2017-2022, yang di kenal dengan pemerintahan *Grande Inklusive*, dalam wawancara dengan media Tafara wakil ketua umum Jose Reis mengatakan bahwa Partai Fretilin ingin membentuk (*insidensia Parlemen*) dalam Parlemen Nasional dalam arti akan mendapatkan dukungan di Parlemen nasional dari partai-partai politik yang ada di Parlemen nasional. Program yang ditawarkan kepada partai politik itu sudah termasuk semua program partai yang ada.

Sebagai Partai yang menang dalam pemilihan, Partai Fretilin melakukan komunikasi Politik terhadap beberapa Partai politik yang mendapatkan kursi di Parlemen Nasional untuk berkoalisi dengan beberapa partai untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022. Landasan Partai Fretilin mengadakan komunikasi politik dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan adalah hasil dari pemilihan yang di keluarkan oleh badan pengadilan tinggi pada tanggal 1 Agustus 2017 yang diumumkan dalam lembaran Negara *Série I, N.º 28 B* Partai Fretilin unggul dalam pemilihan periode 2017-2022. Berdasarkan konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste Pasal 106 (Pengangkatan) 1. Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai politik atau oleh koalisi partai-partai politik yang

mempunyai mayoritas perwakilan dalam Parlemen dan akan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional.

Untuk koalisi membentuk pemerintahan Partai Fretilin melakukan lobi dan dialog dengan strategi pesan untuk mendapatkan konsensus politik. Komunikasi politik partai Fretilin dilakukan mulai tanggal 9–11 Agustus 2017, di antaranya Partai CNRT, PLP, PD, dan KHUNTO untuk memenuhi salah satu syarat dalam Parlemen Nasional. Komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Fretilin menyampaikan politik pesan–pesan politik yang berupa Konsep Pemerintahan Inklusif adalah pemerintahan yang terdiri dari orang–orang partai, profesional dan keahlian.

Dalam komunikasi agar terjadi proses komunikasi, harus di sertai dengan berbagai pihak yang saling berkomunikasi, khususnya dalam tingkatan komunikasi politik. Komunikasi politik yang idealnya adalah proses komunikasi politik berlangsung timbal balik di mana terjadi interaksi di berbagai tingkat politik dengan demikian, proses komunikasi politik adalah di mana semua unsur-unsur komunikasi saling berkaitan sehingga membentuk suatu makna atau maksud (konvergensi/dua arah)

Proses komunikasi yang terjadi pada Partai Fretilin adalah Partai Fretilin menyampaikan pesan-pesan politik kepada partai–partai politik untuk menerima tawaran dan usulan yang disampaikan oleh Partai Fretilin. Dalam hal ini proses komunikasi yang terjadi adalah komunikasi Politik satu arah/ divergensi. Hal yang

serupa yang dialami oleh Partai Fretilin dalam menyampaikan Pesan politik yang disampaikan oleh Partai Fretilin adalah pesan politik satu arah (divergensi).

Komunikasi politik sebagai kegiatan politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. komunikasi politik yang di lakukan Partai Politik Fretilin adalah komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari partai politik yang mendapatkan kursi di Parlemen Nasional yakni Partai CNRT, PLP, PD, dan KHUNTO untuk mendapatkan dukungan dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022. Dalam Komunikasi politik yang di lakukan Partai Fretilin menyampaikan pesan–pesan politik melalui lobi dan dialog dengan partai-partai politik untuk mendapatkan tujuan politik Partai Fretilin yaitu koalisi pemerintahan yang inklusif.

Menurut Rauf (2006:3) menjelaskan bahwa Komunikasi sebagai sebuah kegiatan politik yaitu penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Sedangkan Menurut Mondry (2006:7) komunikasi di katakan efektif apabila seluruh unsur terkait dalam proses itu berjalan dengan baik pula, dengan tujuan bahwa kegiatan komunikasi antara lain agar pesan dapat dimengerti pihak yang diajak berkomunikasi, agar gagasan dapat di terima, supaya mendapat pemahaman orang lain dalam mendapatkan tujuan.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Partai Fretilin sebagai komunikator Politik menyampaikan pesan–pesan politik melalui lobi dan dialog dengan partai –partai politik yang mendapatkan kursi di Parlemen Nasional merupakan sebuah pesan yang membicarakan tentang kekuasaan, janji, dan

otoritas untuk memberikan pengaruh kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Parlemen Nasional agar bersedia berkoalisi dengan Partai Fretilin untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022. Ketua umum Partai Fretilin mengatakan bahwa Partai Fretilin menginginkan pemerintahan inklusif dalam pembentukan Pemerintahan periode 2017-2022 perdana menteri akan diketuai oleh Partai Fretilin.

Pemerintahan inklusif yang diinginkan oleh Partai Fretilin tidak biasa diterapkan karena dalam pemilihan Parlemen Nasional suara dari Partai Fretilin 29,7% dengan perolehan kursi 23 dari 65 kursi di Parlemen Nasional. Sehingga Partai Fretilin mengundang beberapa Partai untuk berkoalisi membentuk pemerintahan inklusif. Target / Sasaran yang diharapkan oleh Partai Fretilin adalah pemimpin partai politik dan partai –partai politik yang mendapatkan kursi di Parlemen Nasional periode 2017-2022 yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk agar menerima tawaran yang ditawarkan oleh partai Fretilin dan pemberian suara (vote) kepada partai dalam Parlemen nasional periode 2017-2022. Dalam komunikasi politik yang diinginkan oleh Partai Fretilin adalah Presiden Partai CNRT Xanana Gusmão untuk bersedia menerima tawaran dari partai Fretilin untuk menerima salah satu Jabatan di kabinet pemerintahan yang akan dibentuk dari Partai Fretilin. Namun setelah hasil pemilihan umum untuk Parlemen nasional periode 2017-2022, yang diumumkan oleh badan pengadilan tinggi presiden Partai CNRT Xanana Gusmão tidak nampak di publik dan menyendirikan di kediaman di desa Balibar 14 kilometer dari Ibukota Negara Timor Leste dan tidak diperbolehkan siapapun untuk bertemu. Target kedua



adalah mengajak Partai CNRT untuk berkoalisi dengan Partai Fretilin dalam pembentukan pemerintahan periode 2017-2022. Sejak awal partai CNRT mengambil sikap dalam konferensi CNRT mengatakan bahwa CNRT tidak mengundang partai politik manapun untuk berkoalisi baik di Parlemen nasional maupun di Pemerintahan CNRT dalam konferensi memutuskan posisinya sebagai Oposisi yang membangun dan edukatif. Tidak mengundang partai politik manapun untuk berkoalisi dalam oposisi maupun tidak mengundang partai politik manapun untuk berkoalisi dalam pembentukan Pemerintahan periode 2017-2022.

Salah satu alasan untuk berkoalisi dengan Partai CNRT adalah perolehan kursi di Parlemen Nasional CNRT memperoleh 22 kursi sehingga apa bila CNRT berkoalisi dengan Partai Fretilin maka yang periode 2017-2022 akan semakin kuat karena total perolehan kursi adalah 45 dari 65 kursi di Parlemen Nasional.

Dalam pertemuan pertama Presiden PLP akan menimbang tawaran dari Partai Fretilin untuk berkoalisi. Dalam pertemuan pertama Partai Fretilin ingin mengajak Partai PLP untuk berkoalisi dan Presiden Parlemen Nasional akan diberikan kepada Presiden Partai PLP Taur Matan Ruak. Namun dalam pertemuan kedua Taur Matan Ruak tidak hadir dan memutuskan wakil Presiden PLP Fidelis Magalhães untuk menjadi Presiden Parlemen Nasional dan adanya dalam kabinet adanya pembagian yang merata sesuai dengan suara di Parlemen Nasional. Tawaran tersebut ditolak oleh ketua umum Partai Fretilin Mari Alkatiri. Di perkuat oleh wakil ketua umum Partai Fretilin dalam wawancara dengan media Tafara Jose Reis mengatakan bahwa Presiden Parlemen Nasional itu Presiden PLP maka Partai Fretilin akan menerima tawaran tersebut namun Presiden PLP

memutuskan wakil Presiden PLP Fidelis Magalhães maka Partai Fretilin menolak dan menggantikan salah satu anggota komite pusat Partai Fretilin yang aktif di Parlemen Nasional adalah Aniceto Longuinos menjadi Presiden Parlemen Nasional.

Sementara di lain pihak Partai Fretilin juga mengundang CNRT dan PD untuk ambil bagian dalam pemerintahan. Hal ini menurut PLP tidak jelas koalisi yang akan dibentuk oleh Partai Fretilin sehingga PLP tidak mengambil bagian dari koalisi.

Partai Demokrat mempunyai moto *Ba O Timor PD Protu atu servi* untuk masyarakat Timor Leste Partai Demokrat siap untuk melayani. Dengan demikian apabila Partai Demokrat diundang maka siap untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan Negara. Sebab Partai Demokrat Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Fretilin dengan alasan Partai Demokrat mempunyai Prinsip untuk masyarakat Timor Leste Partai Demokrat siap untuk melayani dan Partai Demokrat berasal dari Partai Fretilin Partai Fretilin bapak dan Partai Demokrat sebagai anaknya Partai Demokrat merupakan generasi penerus Partai Fretilin

Semula Partai KHUNTO bersedia berkoalisi dengan Partai Fretilin dalam pembentukan pemerintahan periode 2017-2022, Partai KHUNTO ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui memberi dukungan dan bergabung dengan Partai Fretilin dalam membentuk koalisi dalam pembentukan pemerintahan periode 2017-2022 apabila diundang.

Untuk membentuk pemerintahan Partai KHUNTO mengundurkan diri dari pembentukan pemerintahan. akan tetapi KHUNTO mengundurkan diri dalam koalisi pemerintah dengan alasan Partai Fretilin sebagai Partai yang Menang mayoritas dalam pemilihan tidak menghargai dan tidak menerima tawaran atau usulan yang disampaikan oleh KHUNTO. Dalam koalisi di Parlemen Nasional KHUNTO melibatkan diri dalam koalisi tersebut dan dalam pemerintahan KHUNTO mengundurkan diri. Dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan adanya diskriminasi oleh partai Fretilin terhadap Partai KHUNTO, Tidak ada konsensus Politik dalam pembentukan pemerintahan. Antara Partai Fretilin dan KHUNTO sebab ada 2 konsensus politik yaitu: Konsensus dalam Parlemen Nasional dan Konsensus dalam Pemerintahan yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkateri dari Partai Fretilin

Dalam wawancara dengan salah satu media lokal GMNTV dengan Penasehat KHUNTO mengatakan Jose Ramos Horta sebagai salah satu tim komunikasi politik dari Fretilin menelpon kepada penasehat Partai KHUNTO “Naimori Bukar” mengatakan bahwa dalam pembentukan pemerintahan Partai Fretilin tidak membutuhkan KHUNTO karena tidak memiliki sumberdaya Manusia untuk turut dalam ambil bagian di kabinet pemerintahan 2017- 2022, Naimori (Tafara 14:9: 2017 ).

Berdasarkan referensi diatas, yang menyatakan bahwa konstitusi merupakan landasan atau instrument dalam pemerintahan untuk memerintah. Hal tersebut merupakan acuan dalam pemerintahan. Maka, konstitusi merupakan awal dari bentuk peraturan suatu negara. Dalam konstitusi negara Timor Leste

menjelaskan bahwa perdana menteri dipilih partai politik yang mendapatkan suara mayoritas atau koalisi Partai dalam Parlemen Nasional dan dilantik oleh Presiden Republik setelah mendengarkan perwakilan di Parlemen Nasional. Menjelaskan bahwa, pembentukan kabinet sebagaimana dimaksud pasal106.1 Secara konstitusi sangat jelas bahwa, perdana menteri mempunyai otoritas dalam menetapkan Kabinet, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang dimuat dalam Undang - Undang Dasar yang dijadikan sebagai acuan utama Partai Fretilin dalam menetapkan Kabinet yang terdiri dari Partai Demokrat dan FRETILIN , profesional partai, dan kaum intelektual.

Dari uraian diatas komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Fretilin gagal dalam penyampaian pesan-pesan politik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Partai Fretilin dengan partai politik yang mendapatkan kursi di Parlemen Nasional. Target dan sasaran yang diinginkan partai Fretilin tidak tercapai karena CNRT pada prinsipnya akan menjadi oposisi di Parlemen Nasional, PLP mengundurkan diri karena usulan PLP tidak diterima oleh Partai Fretilin dan KHUNTO mengundurkan diri dari koalisi untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022 dengan alasan tidak ada kesepakatan dalam koalisi.

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada mau bergabung dan berkoalisi dalam pembentukan pemerintahan periode 2017-2022 dan pemberian suara (vote) dalam Parlemen Nasional. Pemberian suara dalam Parlemen nasional tentang program dan anggaran yang

akan dilaksanakan pemerintahan periode 2017-2022 yang dipimpin dan diketuai oleh perdana menteri yang berasal dari Partai Fretilin. Hasil dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Fretilin adalah CNRT tetap berprinsip jadi oposisi di Parlemen Nasional, PLP mengusulkan bahwa ada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang merata sesuai dengan proposi di Parlemen Nasional, dan usulan tersebut tidak diterima sehingga PLP mengundurkan diri dari koalisi yang dibentuk oleh Partai Fretilin, KHUNTO semula bersedia bergabung dengan Partai Fretilin untuk berkoalisi dalam pembentukan pemerintah namun hari terakhir penyerahan nama kabinet kepada Presiden Republik KHUNTO mengundurkan diri dari Koalisi tersebut dengan alasan yang tidak ada kesepakatan dalam koalisi untuk Pemerintahan. Partai Demokrat menyetujui permintaan Partai Fretilin untuk berkoalisi dalam pembentukan pemerintahan periode 2017-2022

Efek dari komunikasi politik yang dilakukan partai Fretilin dalam pesan-pesan politik melalui lobi dan pertemuan(dialog) yang disampaikan oleh Partai Fretilin tidak menyentuh partai-partai politik sehingga komunikasi politik yang diinginkan oleh Partai Fretilin tidak tercapai karena CNRT, PLP, dan KHUNTO menolak untuk bergabung dengan Partai Fretilin untuk Membentuk Pemerintahan. Dengan demikian Partai Fretilin gagal dalam penyampaian pesan-pesan politik yang merupakan program dari Partai Fretilin dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Fretilin adalah komunikasi yang satu arah divergensi. Target atau sasaran yang diinginkan oleh Partai Fretilin tidak tercapai sehingga partai Fretilin sulit untuk melakukan koalisi dalam Pembentukan pemerintahan dan

alasan lain adalah partai Fretilin arogansi dalam komunikasi politik, tidak menerima usulan dan masukan dari Partai-partai yang Fretilin undang untuk berkoalisi dalam pembentukan pemerintahan periode 2017-2022.

### **1.3. Koalisi dalam pembentukan Pemerintahan 2017-2022**

Dari hasil tersebut maka Partai Fretilin memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk membentuk Pemerintahan periode 2017-2022, berdasarkan hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh badan pengadilan tinggi yang termuat dalam lembaran Negara dan akan mendapatkan dukungan dari partai politik yang ada di Parlemen Nasional terutama Partai CNRT yang dalam konferensi mengatakan bahwa Partai CNRT akan menjadi Partai oposisi di Parlemen Nasional yang (*edukatif dan konstrutif*) partai yang berpendidikan dan membangun dalam oposisi di Parlemen Nasional. Partai CNRT, PLP, dan KHUNTO menjadi oposisi di Parlemen Nasional dan hal ini sesuai dengan konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste Pasal 70 : 2 (Partai Politik dan Hak Beroposisi) Hak partai-partai politik untuk beroposisi secara demokratis, serta hak untuk diberitahukan informasi secara berkala dan langsung mengenai perkembangan dalam persoalan-persoalan utama yang menyangkut kepentingan nasional, diakui.

Koalisi dalam pembentukan pemerintahan adalah koalisi yang dibentuk oleh Partai Fretilin, Partai Demokrat, dan partai KHUNTO. Dalam konstitusi Pasal 106 (Pengangkatan) 1. Perdana menteri akan ditunjuk oleh partai politik atau oleh koalisi partai-partai politik yang mempunyai mayoritas perwakilan

dalam Parlemen Nasional dan akan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional. Dari penjelasan pasal dalam konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste pembentukan pemerintahan berasal dari mayoritas dalam Parlemen nasional. Koalisi dalam Parlemen nasional antara lain adalah sebagai berikut : Partai Fretilin 23 kursi, Partai Demokrat 7 kursi, dan KHUNTO 5 kursi di Parlemen Nasional dengan total 35 kursi dan partai CNRT dan PLP menjadi koalisi oposisi dengan Kursi 30 dari 65 kursi yang ada di Parlemen Nasional.

Koalisi adalah sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, dimana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Dalam pemerintahan dengan sistem Parlementer, sebuah pemerintahan koalisi dimana pemerintahan tersusun dari koalisi beberapa partai sedangkan oposisi koalisi adalah sebuah oposisi yang tersusun dari koalisi beberapa Partai

Dani Fadillah, M.A. dan M. Najih Farihanto, M.A. Penelitian tentang koalisi di DPR. Dalam penelitian ada temuan bahwa Komunikasi politik partai pengusung Jokowi-JK, berjalan dengan efektif, sehingga meleburnya beberapa partai yang mendukung partai pengusung yang tergabung dalam (KIH). Terbentuknya koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan hasil dari komunikasi politik yang dijalankan oleh Jokowi-JK, dengan sistem bagi-bagi kursi kepada partai pendukung pemerintahan. Komunikasi politik partai pengusung Jokowi-JK, berjalan dengan efektif, sehingga meleburnya beberapa partai yang mendukung partai pengusung.

Yuwono (Gatra, 2014), menilai, tidak ada koalisi permanen dalam perpolitikan karena koalisi dibangun atas dasar kepentingan. Yang ada dalam politik itu kepentingan permanen, kepentingan mendapatkan kekuasaan. Kalau kepentingannya sama, maka jadi kawan. Kalau kepentingannya beda, maka bisa jadi lawan.

Berdasarkan uraian di atas tersebut dengan menggunakan sistem bagi-bagi kursi kepada partai politik pendukung pemerintahan dan koalisi yang dibangun atas kepentingan politik yang sama untuk mendapatkan kekuasaan hal inilah yang tidak dimiliki oleh Partai Fretilin sehingga dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan Timor Leste koalisi yang terdiri dari Partai Fretilin dan Partai Demokrat dan Partai CNRT, PLP, dan KHUNTO membentuk blok oposisi karena beda kepentingan dengan Partai Fretilin.

#### **1.4.Pembentukan Pemerintahan**

##### **4.3.1. Pemerintahan**

Pembentukan pemerintahan periode 2017-2022 yang terdiri dari Partai Fretilin dan Partai Demokrat merupakan pemerintahan yang sah sesuai dengan konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste berdasarkan konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste Pasal 106 (Pengangkatan) 1. Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai politik atau oleh koalisi partai-partai politik yang mempunyai mayoritas perwakilan dalam Parlemen dan akan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional. Dalam pasal tersebut jelas bahwa koalisi untuk pemerintahan terjadi di



Parlemen Nasional sebab pemilihan yang dilaksanakan merupakan pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di Parlemen Nasional yang kemudian membentuk pemerintahan baik berkoalisi atau dengan suara mayoritas dalam Parlemen Nasional. Pasal 103 (Definisi) Pemerintah adalah badan kedaulatan yang bertanggung jawab atas pengarahannya dan pelaksanaan kebijakan umum negara dan merupakan badan Pemerintahan Umum tertinggi. Pasal 104 (Susunan) 1. Pemerintah terdiri atas Perdana Menteri, para Menteri dan para Sekretaris Negara. Pemerintahan yang dikatakan minoritas dalam Parlemen nasional dan sewaktu-waktu pemerintahan akan jatuh dan presiden Republik akan membubarkan Parlemen nasional sesuai dengan konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste Pasal 86 : huruf f Membubarkan Parlemen Nasional, apabila terdapat krisis kelembagaan yang parah, yang menghalangi pembentukan Pemerintah atau pengesahan Anggaran Negara, dan yang berlangsung lebih dari enam puluh hari, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang memiliki kursi di Parlemen, dan dengan Dewan Negara, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 100, agar tindakan pembubaran tidak dinyatakan tidak sah dan kemudian di batalkan; huruf: g Membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri apabila programnya ditolak dua kali secara berturut-turut oleh Parlemen Nasional oleh karena itu pemerintahan yang dibentuk partai Politik Fretilin dan Partai Demokrat adalah Pemerintahan yang dipaksakan karena dalam Parlemen Nasional oposisi lebih kuat dari koalisi pemerintahan yaitu oposisi 35 kursi di Parlemen Nasional dan di pemerintahan 30 kursi.

#### **4.3.2. Oposisi**

Partai oposisi yang terdiri dari Partai CNRT, PLP, dan KHUNTO menginginkan agar Presiden Republik membubarkan Pemerintahan dan memberikan oposisi untuk membentuk pemerintahan yang baru dan mengadakan pemerintahan yang baru. Berdasarkan Konstitusi Republik demokrasi Timor Leste pasal 100 huruf: g Membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri apabila programnya di tolak dua kali secara berturut-turut oleh Parlemen Nasional. Akan tetapi program belum disampaikan blok AMP secara terang-terangan mengatakan program akan kami tolak namun program pemerintahan belum disampaikan di Parlemen nasional Kubu AMP menolok program Pemerintahan tersebut hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi KHUNTO dalam wawancara dengan GMNTV bahwa program Pemerintahan yang akan disampaikan di Parlemen nasional kami akan menolak. Koalisi Oposisi yang seharusnya melalui kongres partai yang memutuskan akan tetapi koalisi berlangsung di Gedung Parlemen Nasional. Oposisi mengharapkan presiden Republik membubarkan Parlemen Nasional dan mengadakan pemilihan ulang

Dari uraian diatas Peta perpolitikan parlemen yang menjadi dua mata angin, yaitu partai-partai pendukung pemerintah (Partai Fretilin dan Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Pembentukan Pemerintahan) dan partai-partai oposisi yang tergabung Koalisi Alianca Mudanca Progresso (AMP). Adanya pembagian koalisi seperti ini seolah memperlihatkan para wakil rakyat tidak dapat kompak dan tidak dapat menjalin komunikasi yang baik antar sesama wakil rakyat. Dan Perbedaan warna dan ideologi partai dapat dikatakan akan menghalangi

komunikasi antar aktor politik yang menginginkan sebuah posisi atau situasi tertentu.

#### **4.4. Hasil strategi komunikasi politik Partai Fretilin**

Hasil Strategi komunikasi politik partai Fretilin tidak sesuai dengan hendak yang diinginkan oleh Partai Fretilin dalam Komunikasi politik untuk koalisi membentuk pemerintahan periode 2017-2022 sehingga Partai yang berkoalisi terdiri dari Partai Fretilin dan Partai Demokrat. Terbentuknya koalisi Partai Fretilin dan Partai Demokrat merupakan hasil dari komunikasi politik yang dijalankan Tim dialog Partai Fretilin dengan sistem bagi-bagi kursi kepada partai pendukung pemerintahan, profesional Partai dan kaum intelektual.

Hasil Komunikasi politik Partai Fretilin dengan menerapkan konsep pemerintahan inklusif (*Governu Inclusive*) dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri dan para menterinya berasal dari Partai Fretilin, Partai Demokrat, Profesional partai, kaum intelektual dan para pemimpin nasional ( mantan presiden dan mantan perdana menteri) diantaranya adalah Ramos Horta dan akan memberikan jabatan kementerian khusus kepada Xanana Gusmão.

Kontroversi muncul ketika pertemuan yang kedua antara Partai Fretilin dan PLP, Presiden PLP tidak hadir dan diwakili oleh wakil Presiden PLP Fidelis dan pada saat itu dari PLP menyampaikan agar dalam Pemerintahan pembagian dalam kabinet yang merata sesuai dengan proporsinya dan PLP pada saat pertemuan menyampaikan bahwa apabila dalam pemerintahan perdana menterinya

berasal dari Partai Fretilin maka Presiden Parlemen Nasional berasal dari PLP. Usulan tersebut Partai Fretilin sebagai Partai pemenang dalam Pemilihan Umum menerima usulan tersebut akan tetapi jika Presiden Parlemen itu adalah Presiden PLP Taur Matan Ruak, maka Partai Fretilin menerima namun PLP memutuskan Wakil Presiden Partai yakni Fidelis Magalhães untuk menjadi presiden Parlemen nasional. Dengan demikian Fretilin menolak dengan usulan dari Partai PLP dan PLP mengundurkan diri dari koalisi. Demikian disusul dengan KHUNTO untuk membentuk pemerintahan Partai KHUNTO mengundurkan diri dari pembentukan pemerintahan. Dengan alasan dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan adanya diskriminasi oleh partai Fretilin terhadap Partai KHUNTO, tidak ada konsensus Politik dalam pembentukan pemerintahan. Antara Partai Fretilin dan KHUNTO sebab ada 2 konsensus politik yaitu Konsensus dalam Parlemen Nasional dan Konsensus dalam Pemerintahan yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri dari Partai Fretilin

Dalam wawancara dengan salah satu media lokal GMNTV dengan Penasehat KHUNTO mengatakan Jose Ramos Horta sebagai salah satu tim lobi dari Partai Fretilin menelpon kepada penasehat Partai KHUNTO “ Naimori Bukar” mengatakan bahwa dalam pembentukan pemerintahan Partai Fretilin tidak membutuhkan Partai KHUNTO karena tidak memiliki sumberdaya Manusia untuk turut dalam ambil bagian di kabinet pemerintahan 2017- 2022. Naimori (Tafara 14:9: 2017)

#### **4.4.1. Manuver Politik CNRT, PLP, dan KHUNTO**

Setelah hasil yang dikeluarkan oleh badan pengadilan tinggi Partai CNRT mengadakan konferensi untuk menentukan arah partai politik, dalam konferensi tersebut presiden CNRT menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden Partai politik CNRT. Akan tetapi dalam konferensi tersebut memutuskan tetap mempertahankan presiden CNRT Xanana Gusmão sampai dengan mengadakan kongres partai dan dalam konferensi tersebut memutuskan partai CNRT dengan tegas mengatakan bahwa partai politik CNRT akan menjadi oposisi yang edukatif dan konstruktif dan tidak mengundang partai politik mana pun untuk koalisi membentuk pemerintahan dan posisi ini ditegaskan lagi pertemuan Xanana Gusmão dengan partai Fretilin di Hotel New turismo di depan media bahwa CNRT mengatakan bahwa mengutamakan kepentingan nasional kata Presiden Partai CNRT Xanana Gusmão. Namun di lain hal CNRT melakukan komunikasi politik dengan partai PLP dan KHUNTO untuk membentuk blok oposisi di Parlemen nasional yang dikenal dengan AMP ( *Aliança Mudanca Progreso* ) yang terdiri Partai CNRT, PLP, dan KHUNTO dengan jumlah kursi 35 kursi dari 65 kursi yang ada di Parlemen Nasional. Apabila melihat dengan secara seksama apa yang diputuskan di konferensi dan di bicarakan media baik surat kabar maupun di Televisi sangat pertentangan dengan apa yang dilakukan oleh CNRT baik di Parlemen Nasional maupun di luar yang sering mengkritik pemerintahan.

Semula PLP mengatakan akan menjadi Oposisi di Parlemen Nasional akan tetapi dalam pertemuan di Novo turismo antara Partai politik Fretelin yang dipimpin oleh Mari Alkatiri dan PLP yang dipimpin oleh presiden PLP Taur

Matan Ruak mantan Presiden Republik Timor Leste yang ke-III dalam pertemuan tersebut preseden partai politik Taur Matan Ruak mengatakan bahwa akan mempelajari dan kemungkinan akan ambil bagian dalam pemerintahan. Namun PLP yang dalam kampanye politik menyerang dan mengkritik Partai CNRT sebaliknya bergabung dengan CNRT, PLP, dan KHUNTO membentuk Blok oposisi di Parlemen Nasional. PLP menginginkan bahwa jabatan Presiden Parlemen nasional dari PLP yaitu Fidelis Magalhães dan adanya pembagian jabatan dalam pemerintahan sesuai dengan proporsi kursi di Parlemen Nasional.

Pada Awalnya KHUNTO mengatakan bahwa Partai KHUNTO bersedia apabila diundang dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan maka KHUNTO akan mengambil bagian dalam Pemerintahan ini dengan partai maupun untuk membentuk pemerintahan. Oleh karena itu Partai KHUNTO berkoalisi dalam Parlemen Nasional dengan komposisi sebagai berikut: Partai Fretilin yang menduduki Presiden Parlemen Nasional, Partai Demokrat Wakil I presiden Parlemen Nasional, dan Partai KHUNTO perwakilannya menjadi Wakil II Presiden Parlemen Nasional. Namun akhirnya mengundurkan diri dari koalisi untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022 yang dipimpin oleh Partai Fretilin. Partai KHUNTO mengundurkan diri dari koalisi untuk membentuk Pemerintahan dan bergabung dengan Partai CNRT, PLP, dan mendirikan Blok AMP di Parlemen Nasional. Namun melihat secara seksama Partai KHUNTO ikut dengan koalisi dalam pembentukan Parlemen nasional yang komposisinya terdiri dari Partai Fretilin dengan Kursi 23, Partai Demokrat dengan 7 kursi di Parlemen Nasional dan Partai KHUNTO dengan 5 kursi di Parlemen Nasional

dengan total 35 kursi dari 65 kursi yang ada di Parlemen Nasional dengan proporsi Presiden Parlemen Nasional dari Partai Fretilin, wakil I presiden Parlemen dari Partai Demokrat dan Wakil II Presiden Parlemen Nasional dari KHUNTO.

#### **4.4.2. Membidik Kekuasaan.**

Kekuasaan adalah substansi yang diperjuangkan oleh para elit politik. Jika kita perhatikan dengan seksama kekuasaan yang diinginkan oleh semua partai Politik. Partai Politik CNRT pada mulanya memegang teguh pada Prinsip yang telah disampaikan pada saat kampanye dan pada saat konferensi yang diadakan Partai CNRT yang dihadiri oleh kader Partai politik dari 13 kabupaten bahwa Partai CNRT tidak mengundang partai politik manapun untuk berkoalisi dan untuk membentuk pemerintahan akan menjadi oposisi di Parlemen nasional, menjadi oposisi yang edukatif dan kontraktif. Namun kenyataan Presiden CNRT menginginkan kekuasaan dalam pemerintahan dan menulis Surat kepada perdana menteri Mari Alkatiri untuk memberikan beberapa menteri kepada Partai CNRT yaitu: Menteri keuangan, Menteri Perminyakan, dan Menteri pekerjaan umum (*Infratraktur*) permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri. Selama Pemerintahan berjalan Presiden CNRT mendiamkan diri di luar negeri dengan alasan membicarakan masalah celah Timor (sengketa perminyakan antara Timor Leste dengan Australia). Pada hal dalam wawancara dengan media GMNTV setelah pertemuan dengan ketua umum partai Fretilin Presiden CNRT Xanana Gusmão mengatakan bahwa demi kepentingan nasional Partai CNRT

akan mendukung partai Fretilin untuk membentuk Pemerintahan periode 2017-2022.

Hal lain diinginkan oleh PLP adalah jabatan perdana menteri yang diinginkan oleh Presiden Taur Matan Ruak dan adanya pembagian jabatan yang sesuai dengan proporsi dalam Parlemen Nasional sesuai janji yang telah disampaikan dalam kampanye politik untuk pemilihan umum periode 2017-2022, sehingga tawaran dari Partai Fretilin agar Presiden PLP menjadi presiden Parlemen Nasional tawaran tersebut ditolak oleh Presiden PLP dan tawaran tersebut dialihkan kepada wakil presiden PLP Fidelis Magalhães. Oleh Karena itu Partai Fretilin menolak usulan dari PLP dengan alasan bahwa wakil presiden dari PLP belum mempunyai pengalaman dan masih baru untuk jabatan Presiden Parlemen Nasional. Keinginan yang merupakan alasan Presiden PLP bertentangan dengan konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste Pasal: 106.

KHUNTO menginginkan beberapa jabatan penting di pemerintah, oleh karena itu usulan tersebut oleh Partai Fretilin menolak. Alasan lain dari Partai KHUNTO adalah pada hari terakhir untuk membentuk pemerintahan KHUNTO tidak hadir dengan alasan salah seorang tim dialog dari Partai Fretilin menelpon penasehat umum Partai KHUNTO “Naimori Bucar” mengatakan bahwa KHUNTO tidak pantas untuk berkoalisi dengan Partai Fretilin karena tidak mempunyai sumber daya manusia dan tenaga professional.

Dari uraian tersebut Partai politik yang tergabung dalam Blok AMP menginginkan kekuasaan dan jabatan dalam pemerintahan agar Pemerintahan tersebut dialihkan kepada Blok AMP, bila hal ini tidak dilakukan, Blok AMP



meminta membubarkan Pemerintah dan Parlemen Nasional dan mengadakan pemilihan umum. Namun melihat dari pasal tersebut program pemerintahan belum ditolak untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sementara dari pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri dalam menyampaikan program pemerintahan di Parlemen Nasional mengatakan bahwa program pemerintahan diibaratkan seperti pasangan anak muda yang berpacaran dan hamil sebelum anak itu lahir si wanita bertanya kepada suaminya bahwa saya hamil tetapi jawaban dari suaminya mengatakan bahwa gugurkan jasa anak itu, apakah anak itu laki –laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program yang disampaikan oleh pemerintahan belum dibaca isinya dan belum mengetahui sudah mentah–mentah menolak program tersebut. apakah program tersebut menyentuh masyarakat dan untuk kepentingan umum atau tidak hal ini merupakan maneuver politik yang dilakukan oleh koalisi oposisi di Parlemen Nasional karena koalisi oposisi menginginkan kekuasaan yaitu untuk memimpin dalam pemerintahan, sehingga pembentukan pemerintahan periode 2017-2022 terbagi dalam 2 tahap dalam pembentukan yaitu tahap pertama kabinet yang terdiri dari 11 orang yang terdiri dari perdana menteri, menteri kordinator, dan wakil menteri yang dilantik oleh Presiden Da Republik Demokrasi Timor Leste pada tanggal 15 September 2017. (*Jornal da República, 15 de Setembro de 2017*) Tahap kedua susunan menteri yang terdiri dari 21 orang dan dilantik Presiden Republik pada tanggal 3 Oktober 2017. dengan total 32 orang. (*Jornal da República, 3 oktober 2017*)